

BAB II

GAMBARAN UMUM LBH APIK YOGYAKARTA

A. SEJARAH

LBH APIK Yogyakarta merupakan sebuah organisasi swadaya masyarakat yang terbentuk karena dilatarbelakangi oleh kondisi perempuan di Yogyakarta yang hak-haknya banyak dilecehkan. Kondisi sosial budaya masyarakat Jawa yang cenderung masih menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan menyebabkan banyak perempuan di Yogyakarta. Sementara yang menjadi korban kekerasan atau yang hak-haknya dirampas takut untuk melakukan perlawanan atau meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Dilatarbelakangi oleh hal inilah beberapa orang perempuan di Yogyakarta mendirikan LBH APIK Yogyakarta dengan tujuan awal untuk membantu perempuan-perempuan di Yogyakarta dalam menghadapi masalah, khususnya pada masalah perlindungan hak-hak perempuan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) adalah suatu perkumpulan nirlaba yang didirikan pada tanggal 2 Mei 2002. Yayasan yang berkedudukan di Yogyakarta ini memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam anggaran dasar organisasi. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah, pertama memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang kebangsaan, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, keturunan, suku, dan

jenis kelamin. Kedua adalah menumbuh, mengembangkan dan memajukan pemahaman, penghayatan dan pengalaman serta penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia, serta mempertinggi kesadaran hukum dalam masyarakat umumnya dan secara khusus terhadap kaum perempuan, agar memiliki daya, inisiatif dan kesadaran yang tinggi atas hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang mandiri.

Ketiga adalah secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan lembaga-lembaga kelompok maupun masyarakat pada umumnya dan yang keempat adalah membina, mengawasi dan berupaya memperbaharui hukum khususnya yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aspek yang berkaitan dengan fitrah dan kodrat perempuan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka didirikanlah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk keadilan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini akan melakukan pembelaan, pendampingan dan pelayanan hukum kepada kaum perempuan khususnya perempuan yang lemah secara ekonomi, politik dan sosial budaya serta mendorong terjadinya perubahan sistem hukum melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai kepedulian yang sama.

B. VISI DAN MISI

Berdasarkan tujuan dan nilai-nilai yang telah dituangkan dalam anggaran dasar, maka LBH APIK Yogyakarta memiliki memiliki visi dan misi sebagai berikut.

- a. Perempuan Indonesia yang berada di Yogyakarta bergabung dalam LBH APIK Yogyakarta mempunyai keyakinan serta menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan manusia dalam pola hubungan perempuan dan laki-laki.
- b. LBH APIK Yogyakarta melihat dan merasakan adanya ketimpangan pola hubungan laki-laki dan perempuan disemua bidang kehidupan yang mengakibatkan perempuan mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi di bidang ekonomi, subordinasi dan pengambilan keputusan diberbagai tingkat masyarakat, *stereotyping* (pembakuan ciri), beban kerja berlebihan serta kekerasan fisik, mental maupun seksual.
- c. Oleh karena itu LBH APIK Yogyakarta mengupayakan suatu sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan di atas. Dimana ketidakadilan gender dalam sistem hukum tersebut perlu diubah dan dihapuskan baik pada tingkat substansi peraturannya sendiri, struktur hukumnya (administrasi, sarana, prasarana dan sikap penegak hukumnya), maupun pada tingkat sikap mental, adat istiadat, kebiasaan dan budaya hukum masyarakat. Dengan mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan:

- 1) Tidak marginalisasi
- 2) Tidak terjadi subordinasi
- 3) Tidak terjadi *stereotyping*
- 4) Tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual
- 5) Tidak terjadi beban berlebihan pada suatu pihak

C. NILAI-NILAI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, LBH APIK Yogyakarta berpegang teguh pada nilai-nilai sebagai berikut.

a. Keadilan

LBH APIK Yogyakarta akan mewujudkan nilai-nilai keadilan dengan setiap orang memperoleh akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya yang ada sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan keadilan, karena keadilan merupakan hak dari semua manusia, sehingga tidak seorangpun boleh menghalanginya.

b. Kejujuran

LBH APIK Yogyakarta akan menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan dan tanggung jawab. Sebagai LSM yang bergerak di bidang hukum LBH APIK sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Karena dengan kejujuran itulah LBH APIK Yogyakarta dapat terus aktif dan bertahan.

c. Kerakyatan

LBH APIK Yogyakarta akan berpihak kepada orang-orang tertindas yang tidak berdaya dan senantiasa berinisiatif dan proaktif melakukan pembelaan bagi kelompok perempuan yang mengalami ketidakadilan.

d. Keberagaman

LBH APIK Yogyakarta mengembangkan sikap kebersamaan, toleransi dan non sektarian. LBH APIK Yogyakarta sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman, hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam budaya bahasa, agama dan etnis. Sehingga untuk menjaga kerukunan yang ada maka nilai keberagaman haruslah dijunjung tinggi.

e. Kemandirian

Sebagai LSM LBH APIK Yogyakarta, berusaha memegang teguh nilai kemandirian, dengan tujuan untuk menjaga profesionalisme. LBH APIK Yogyakarta juga berusaha mengembangkan organisasi sesuai dengan orientasi dasar dalam kebebasan dan tindak ditentukan oleh pihak lain.

f. Kelestarian Lingkungan

LBH APIK Yogyakarta senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

D. PROGRAM POKOK

Dalam upayanya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di Yogyakarta, LBH APIK Yogyakarta mencoba mengaplikasikannya dalam program-program yang disusun. Berikut ini adalah program-program pokok yang disusun oleh LBH APIK Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta visi dan misi organisasinya.

a. Bantuan Hukum

Program ini diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis gender baik dalam rangka mewujudkan keadilan bagi mitra (pencari keadilan) maupun untuk mempromosikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia.

b. Perubahan Hukum

Program ini bertujuan untuk mempromosikan pembuat kebijaksanaan dan peraturan yang tepat untuk menjamin agar kaum perempuan dapat menikmati hak-hak asasinya dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar prinsip-prinsip persamaan, pembangunan dan perdamaian.

c. Studi Kebijakan

Program ini akan melakukan analisa, memberikan informasi dasar tentang kebijakan yang berdampak pada posisi kaum perempuan, serta melakukan usulan perubahan sistem hukum agar lebih adil.

d. Penyadaran Hukum

Program ini merupakan upaya untuk ikut meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat tentang nilai-nilai hukum dan keadilan, utamanya untuk memberdayakan kaum perempuan. Tujuan ini akan dicapai melalui seminar, lokakarya dan pembentukan opini publik.

e. Publikasi dan Informasi

Program ini merupakan upaya untuk ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan dilakukan dengan cara menyebarkan informasi hukum secara populer tentang hak-hak perempuan, baik melalui media cetak, elektronik dan media tradisional lainnya.

f. Penguatan Jaringan Kerja

Program, penguatan jaringan kerja merupakan kegiatan pendukung yang penting bagi terlaksananya seluruh program LBH APIK Yogyakarta.

g. Rumah Peduli (*Shelter*)

Program Rumah Peduli ini digunakan untuk tinggal sementara bagi mitra-mitra LBH APIK Yogyakarta, yang sedang mengalami permasalahan dengan melakukan pendampingan bagi korban secara psikologis maupun proses penyelesaian kasus korban.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi dari LBH APIK Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Direktur Eksekutif : Rina Imawati, SH

Koordinator Penyadaran Hukum : Kartika Dewi, SH

Koordinator Kampanye	: Yustina, SH Rina Imawati, SH
Koordinator Bantuan Hukum	: Siti Roswati, SH Dra. Budi Wahyuni, MM, MA
Koordinator Keuangan	: Sofia Yasmin, SH
Bidang Administrasi	: Yustina, BA
Koordinator induk	: Switi Andari, SH

a. Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif bertugas sebagai penanggung jawab dari semua tugas program-program yang dilaksanakan oleh LBH APIK Yogyakarta. Selain itu direktur eksekutif juga bertugas menjalin hubungan baik keluar, yaitu dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lain yang terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh LBH APIK Yogyakarta.

b. Koordinator Kampanye

Bidang Kampanye ini bertanggung jawab penuh terhadap program-program kampanye yang dirancang oleh LBH APIK Yogyakarta sendiri. Bidang kampanye ini memegang penting atas keberhasilan dari kampanye yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam mengkoordinir rancangan strategi kampanye yang akan dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta

c. Koordinator Penyadaran Hukum

Bidang Penyadaran Hukum memiliki tugas untuk mengupayakan masyarakat Yogyakarta melek hukum. Agar jika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan hukum mereka dapat mengerti apa yang bisa mereka lakukan. Dengan demikian masyarakat luas akan lebih cerdas dalam setiap permasalahan hukum yang mereka hadapi.

d. Koordinator Bantuan Hukum

Bidang Bantuan Hukum merupakan bidang yang bertugas menampung pengaduan atau keluhan yang masuk ke LBH APIK Yogyakarta, yang datang dari masyarakat yang memiliki permasalahan hukum. Selain itu bidang ini bertanggung jawab membantu klien dalam persidangan.

e. Koordinator Keuangan

Layaknya organisasi lain baik profit maupun non profit bidang keuangan merupakan bidang yang sangat dibutuhkan. Tugas dari bidang keuangan adalah bertanggung jawab mengurus masalah keuangan. Masalah keuangan yang dimaksud diantaranya adalah perencanaan pendanaan program kampanye, penyadaran hukum dan program lain yang akan dilaksanak oleh LBH APIK Yogyakarta, mencatat dan melaporkan keluar masuknya uang.

f. Koordinator Informasi dan Dokumentasi

Bidang Informasi dan Dokumentasi merupakan bidang yang mengurus masalah informasi yang harus disampaikan kepada khalayak serta mengurus masalah pendokumentasian.

g. Bidang Administrasi

Bidang administrasi: merupakan bidang yang mengurus permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan administrasi. Misalnya surat menyurat dan lain-lain.

F. SUMBER DANA

Dalam menjalankan program-program yang telah dirancang tentunya LBH APIK membutuhkan pendanaan. Adapun dana operasional diperoleh oleh LBH APIK dari *INPI Pact* dan *New Zealand Embassy*, sebelum mendapatkan dana dari *INPI Pact* dan *New Zealand Embassy* dana operasional didapat dari LBH APIK Jakarta.

LBH APIK juga memiliki dana sendiri yang didapat dari klien yang mampu sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan pada kasus-kasus lain. Kasus-kasus tersebut dipilih dan inisiatif penanganannya dianggap menguntungkan LBH APIK Yogyakarta dan masyarakat. Untuk konsultasi pendaftaran 50.000 untuk 5 kali konsultasi di LBH APIK YOGYAKARTA.

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1. Kelebihan

Dalam melaksanakan visi dan misi LBH APIK Yogyakarta mempunyai wadah lembaga yang berbadan hukum. Mempunyai tenaga-tenaga pekerja yang profesional di bidangnya. Sehingga LBH APIK Yogyakarta selalu siap membantu masyarakat, baik memberikan

penyuluhan atau penyadaran hukum maupun memberikan bantuan hukum kepada perempuan Yogyakarta, khususnya yang mengalami ketidakadilan gender.

LBH APIK Yogyakarta mempunyai kekuatan pada ketua dan staf karena semua lulusan perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi yang memadai. Ketua dan beberapa staf memiliki latar belakang pengacara, staf keuangan yang bergelar sarjana ekonomi dan ahli di bidang akuntansi. LBH APIK Yogyakarta juga mempunyai empat orang mitra di daerah yang berlatar belakang pengacara dan kader-kader muda yang tersebar di SMA-SMA lewat sebuah program yang dikenal dengan *community education*.

Selain mempunyai kelebihan di bidang sumber daya manusia LBH APIK Yogyakarta juga mendapatkan informasi terus menerus yang diperoleh dari NGO di luar Yogyakarta, seperti LBH APIK Jakarta dan LBH Apik yang tersebar di 13 cabang di seluruh Indonesia yang selalu mengirim informasi rutin melalui buletin NGO, WALHI Aceh, LAAI Medan, PIAR Kupang dan lain-lain. Untuk wilayah Yogyakarta LBH APIK menjalin hubungan dengan beberapa NGO di Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Polres Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul.

2. Kekurangan

Selain memiliki kelebihan-kelebihan yang telah diuraikan di atas, LBH APIK juga memiliki kelemahan-kelemahan. Staf di LBH APIK Yogyakarta yang ada, staff tenaga kerja yang kurang. Informasi juga selama ini masih kurang aktif dalam menjalin hubungan dengan mitra, sehingga informasi terbatas serta kurangnya pengenalan lembaga pada pihak luar.

Kelemahan juga terjadi di unsur keuangan. Dengan krisis moneter yang terjadi terus menerus, pengeluaran meningkat. LBH APIK Yogyakarta dalam pendanaan kegiatannya sampai saat ini masih tergantung kepada pihak luar. Sarana dan prasarana meskipun ada tetapi masih kurang memadai terutama buku-buku referensi.